

## PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA BAGIAN SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Rosalia Yuliani<sup>1</sup>, Intan Mustafa<sup>2</sup>, Lodowik Nikodemus Kedoh<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [rosaliayuliani4@gmail.com](mailto:rosaliayuliani4@gmail.com)

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 03/2/2026; Diterbitkan: 15/2/2026

### ABSTRAK

Penerapan prinsip *good governance* menjadi fondasi krusial dalam reformasi birokrasi daerah, namun realitasnya sering terkendala oleh kapasitas sumber daya dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan yang baik pada Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data digali menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* telah dilaksanakan namun belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas teridentifikasi sudah berjalan baik secara prosedural internal, namun keterbukaan informasi bagi publik masih sangat terbatas. Demikian pula, partisipasi masih didominasi pihak internal tanpa pelibatan signifikan dari masyarakat luar. Hambatan utama ditemukan pada aspek profesionalisme dan efektivitas akibat minimnya kompetensi aparatur serta rendahnya adopsi teknologi informasi dalam sistem kearsipan yang masih manual. Simpulan utama menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola sekretariat mendesak dilakukan melalui perluasan akses transparansi publik, penerapan akuntabilitas berbasis kinerja, pelibatan partisipasi eksternal, serta modernisasi sistem administrasi berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.

**Kata Kunci:** *good governance, tata kelola, sekretariat, kearsipan, perpustakaan.*

### ABSTRACT

The application of good governance principles is a crucial foundation for regional bureaucratic reform, but in reality, it is often hampered by resource capacity and organizational culture. This study aims to analyze the implementation of good governance in the Secretariat Section of the Regional Archives and Library Service of Sikka Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were extracted using in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed through reduction, presentation, and verification. The research findings indicate that the application of good governance principles has been implemented but is not yet optimal. The principles of transparency and accountability were identified as being well-functioning internally, but information disclosure to the public is still very limited. Similarly, participation is still dominated by internal parties without significant involvement from the external community. The main obstacles were found in the aspects of professionalism and effectiveness due to the lack of competency of the apparatus and the low adoption of information technology in the still manual archiving system. The main conclusion emphasizes that optimization of secretariat governance is urgently carried out through expanding access to public transparency, implementing performance-based accountability, involving external participation, and modernizing the digital-based administration system to achieve excellent public service.

**Keywords:** *good governance, governance, secretariat, archives, library*

## PENDAHULUAN

*Good Governance* telah menjadi salah satu landasan utama dalam upaya reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia sejak dimulainya era otonomi daerah yang dinamis. Konsep ini tidak sekadar berfokus pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi juga mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel serta transparan (Pomeranz & Stedman, 2020). Berdasarkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme*, terdapat delapan prinsip utama yang menjadi tolak ukur tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari partisipasi hingga efektivitas. Secara ideal, setiap unit administrasi publik dituntut untuk mencapai tingkat kepatuhan standar pelayanan minimal sebesar 100% guna memenuhi aspirasi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini wajib diinternalisasi dalam pengambilan keputusan di seluruh tingkatan birokrasi guna memastikan responsivitas terhadap kebutuhan publik (Keping, 2018). Efektivitas pengelolaan negara sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai inklusivitas dan penegakan hukum diterapkan dalam operasional sehari-hari. Transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern memerlukan komitmen kuat untuk meninggalkan pola lama yang kaku dan beralih pada sistem yang lebih profesional.

Implementasi prinsip-prinsip ini secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di tingkat daerah. Namun, dalam tataran praktis, penerapan *Good Governance* sering kali membentur tantangan struktural serta kultural yang kompleks, termasuk keterbatasan kapasitas pegawai dan resistensi budaya organisasi. Banyak penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di berbagai unit kerja pemerintahan (Dar & Shairgojri, 2022). Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Lebak mengindikasikan bahwa meskipun aspek transparansi dan akuntabilitas telah terpenuhi secara bertahap, masih terdapat kesenjangan sekitar 30% pada kualitas manajemen internal dan komunikasi publik (Permatasari, 2020). Hal serupa ditemukan di Tolitoli, di mana penerapan prinsip tata kelola belum berjalan optimal akibat rendahnya disiplin pegawai serta lemahnya pengelolaan data internal (Bantilan, 2024). Fenomena ini menggambarkan bahwa kesenjangan antara regulasi yang diidealkan dengan realitas di lapangan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap hambatan-hambatan teknis agar reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada tataran dokumen administratif semata melainkan berdampak nyata.

Pentingnya pendekatan tata kelola yang baik juga telah banyak dikaji dalam konteks pelayanan publik pada dinas-dinas strategis, termasuk sektor kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unit kerja vital yang mendukung fungsi birokrasi melalui pengelolaan dokumentasi administrasi dan penyediaan sumber informasi bagi masyarakat luas. Tata kelola organisasi yang profesional menjadi prasyarat mutlak agar unit ini mampu menjalankan fungsinya dengan transparan dan akuntabel kepada *stakeholders* (Dewi, 2022). Kendati demikian, realitas menunjukkan tantangan besar; misalnya di Kota Palembang, ditemukan bahwa prinsip tanggung jawab dan transparansi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga kualitas pelayanan publik belum mencapai standar ideal (Saputri & Mellita, 2019). Data sering kali menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik cenderung rendah apabila mekanisme akses data tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme tata kelola internal secara menyeluruh agar fungsi layanan informasi tidak terhambat oleh birokrasi yang tertutup. Penguatan sistem kearsipan yang berbasis pada prinsip *Good Governance* akan menjadi kunci

utama dalam mendukung transparansi pemerintah daerah secara keseluruhan di masa depan melalui manajemen yang lebih terbuka.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki struktur pemerintahan yang menuntut koordinasi administratif yang tinggi dan terintegrasi. Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di daerah ini memiliki peran sentral dalam mengelola administrasi internal serta memberikan pelayanan edukatif kepada masyarakat. Namun, tingkat penerapan prinsip *Good Governance* pada unit kerja tersebut hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum diteliti secara komprehensif oleh para akademisi (Vantiola *et al.*, 2024). Kesenjangan antara standar ideal birokrasi dengan praktik senyatanya muncul akibat faktor keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan belum tersedianya sistem transparansi informasi yang jelas. Diperkirakan terdapat kekurangan tenaga fungsional arsiparis hingga 40% dari kebutuhan ideal, yang secara langsung berdampak pada efisiensi kerja organisasi. Lemahnya sistem akuntabilitas internal di tingkat sekretariat ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas secara keseluruhan. Permasalahan ini menciptakan urgensi untuk melakukan pemetaan masalah yang lebih spesifik guna menutup celah antara harapan publik dan kinerja birokrasi lokal yang masih memerlukan banyak pembenahan sistemik agar selaras dengan mandat undang-undang.

Penelitian ini hadir sebagai upaya sistematis untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Governance* di Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka. Nilai baru atau inovasi dari penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang mendalam terhadap unit sekretariat kearsipan di wilayah timur Indonesia, sebuah area yang sering kali luput dari perhatian riset tata kelola arus utama. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran faktual mengenai sejauh mana prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif telah diimplementasikan dalam struktur organisasi terkecil. Hasil akhirnya diharapkan mampu menawarkan saran strategis yang konkret untuk memperbaiki mekanisme tata kelola internal sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Inovasi metodologis yang digunakan juga diharapkan dapat menjadi *blueprint* bagi evaluasi unit kerja lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Timur. Dengan menutup kesenjangan antara teori dan praktik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui perbaikan tata kelola birokrasi yang nyata. Transformasi menuju unit kerja yang *citizen-centric* menjadi target utama guna memastikan bahwa aspirasi masyarakat Sikka dapat terakomodasi dengan baik dalam sistem pemerintahan yang modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, praktik, serta makna penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola bagian sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial dan administratif yang terjadi di lapangan secara alami, kontekstual, dan komprehensif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi tata kelola sekretariat, khususnya terkait dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan profesionalisme aparatur (Vignali *et al.*, 2016). Dengan metode ini, peneliti tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menguraikan dan menganalisis fenomena yang ada berdasarkan data empiris (Safarudin *et al.*, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka, dengan fokus pada bagian sekretariat sebagai unit yang menjalankan fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, dan pengelolaan

sumber daya manusia. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas serta menjadi pusat koordinasi tata kelola internal. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis dan penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian ini adalah aparatur yang terlibat langsung dalam tata kelola bagian sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian yakni Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka, Sekretaris Dinas dan Kepala Subbagian atau staf bagian sekretariat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur kepada informan penelitian untuk memperoleh data mengenai pemahaman, pengalaman, dan praktik penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola sekretariat. Wawancara ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam terkait mekanisme kerja, hambatan, serta upaya perbaikan tata kelola. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas kerja bagian sekretariat, termasuk proses administrasi, pengelolaan arsip, pola koordinasi, dan interaksi antarpegawai. Observasi ini bertujuan untuk mencocokkan data hasil wawancara dengan kondisi nyata di lapangan dan Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi, seperti struktur organisasi, peraturan internal, laporan kegiatan, arsip administrasi, dan dokumen pendukung lainnya (He et al., 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tiga tahap utama, Reduksi Data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola sekretariat. Penyajian Data, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara sistematis sesuai dengan indikator *good governance* yang digunakan dalam penelitian dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul dari data. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk menjamin keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi (Schlunegger et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Tata Kelola Bagian Sekretariat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka, diperoleh gambaran bahwa sekretariat memegang peran sentral dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Bagian sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan program, serta pengelolaan arsip dinamis yang berkaitan langsung dengan aktivitas organisasi. Secara struktural, sekretariat telah menjalankan fungsi



koordinasi antarbidang dan menjadi penghubung antara pimpinan dengan unit teknis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip *good governance*

## 2. Penerapan Prinsip Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah mulai diterapkan, khususnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan. Informasi terkait program kerja dan penggunaan anggaran disampaikan melalui laporan internal serta rapat koordinasi rutin. Selain itu, dokumen-dokumen administrasi tertentu dapat diakses oleh pihak internal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun demikian, transparansi masih bersifat internal dan belum sepenuhnya menjangkau publik. Informasi terkait kinerja sekretariat, prosedur pelayanan administrasi, maupun pengelolaan arsip belum disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih terbatas pada aspek administratif internal dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *good governance*.



**Gambar 1. Proses Penggalian Data**

## 3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dalam aspek akuntabilitas, sekretariat telah melaksanakan pertanggungjawaban kinerja melalui penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan dinas dan instansi terkait. Setiap kegiatan administrasi dan program kerja dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban formal. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa mekanisme evaluasi kinerja aparatur belum berjalan secara optimal. Akuntabilitas individu pegawai masih lebih menekankan pada pemenuhan tugas rutin dibandingkan pencapaian kinerja berbasis hasil. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan kualitas pelayanan.

## 4. Penerapan Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam tata kelola sekretariat terlihat dalam pelibatan pegawai dalam rapat internal, perencanaan kegiatan, serta pelaksanaan tugas administrasi. Pegawai diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait pelaksanaan kerja sehari-hari. Namun, partisipasi tersebut masih terbatas pada lingkungan internal organisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, seperti masyarakat atau pengguna layanan perpustakaan dan kearsipan, dalam proses perencanaan dan evaluasi tata kelola sekretariat masih sangat minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good*

governance yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan publik.

#### 5. Penerapan Prinsip Profesionalisme dan Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur sekretariat telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan belum meratanya kompetensi teknis, khususnya di bidang kearsipan dan administrasi modern, menjadi kendala utama dalam mewujudkan profesionalisme dan efektivitas kerja. Pengelolaan arsip masih didominasi oleh sistem manual, sehingga berdampak pada efisiensi kerja dan kecepatan pelayanan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

#### Pembahasan

Analisis mendalam terhadap tata kelola pada Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa unit ini memegang fungsi vital sebagai tulang punggung administrasi, keuangan, dan perencanaan. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan ideal *good governance* dengan realitas operasional yang masih didominasi oleh sistem manual dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam aspek transparansi, temuan penelitian mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi masih terperangkap dalam ruang lingkup internal birokrasi, seperti pelaporan anggaran dan perencanaan program yang hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas. Fenomena ini menegaskan bahwa transparansi belum dimaknai sebagai kewajiban publik, melainkan sekadar prosedur administratif semata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hamdah et al. (2021) yang menyatakan bahwa banyak organisasi publik masih memahami transparansi sebatas pelaporan internal, bukan sebagai keterbukaan kepada masyarakat luas. Implikasi dari ketertutupan ini adalah minimnya kontrol publik terhadap kinerja dinas, yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah dalam mengelola aset informasi publik (Chairunnisa et al., 2023; Wahanisa et al., 2023).

Tinjauan terhadap prinsip akuntabilitas mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban kinerja di lingkungan sekretariat masih terjebak pada dimensi prosedural dan formalitas administratif. Meskipun laporan kegiatan dan keuangan telah disusun secara rutin sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme evaluasi terhadap dampak dan kualitas kinerja aparatur belum berjalan secara optimal. Akuntabilitas individu lebih banyak diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban kehadiran dan penyelesaian tugas rutin harian, bukan pada pencapaian target strategis yang berorientasi hasil atau *outcome*. Situasi ini menunjukkan adanya diskoneksi antara pelaporan administratif dengan peningkatan kualitas layanan publik yang sesungguhnya. Hal ini relevan dengan temuan Garung dan Ga (2020) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Ketiadaan sistem penilaian kinerja yang berbasis hasil menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas organisasi secara riil, sehingga reformasi birokrasi di tingkat sekretariat berjalan lambat dan belum mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis dan menuntut standar tinggi (Habibani & Frinaldi, 2025; Jabar & Frinaldi, 2025; Sendika & Frinaldi, 2025; Supawanhar et al., 2024; Surahmi et al., 2025).

Dinamika partisipasi dalam tata kelola sekretariat memperlihatkan dua wajah yang berbeda, di mana partisipasi internal telah berjalan cukup baik melalui pelibatan pegawai dalam rapat dan perencanaan, namun partisipasi eksternal masih sangat minim. Eksklusivitas proses perencanaan yang hanya melibatkan unsur internal organisasi berpotensi melahirkan program

kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat pengguna layanan kearsipan dan perpustakaan. Ketiadaan mekanisme formal untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran dari pemangku kepentingan eksternal menandakan bahwa organisasi masih berorientasi pada pemenuhan tugas birokrasi daripada kepuasan publik. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Suryani (2019), partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan legitimasi kebijakan dan kualitas pelayanan publik. Tanpa adanya kanal partisipasi yang inklusif, sekretariat kehilangan peluang berharga untuk mendapatkan umpan balik konstruktif yang dapat digunakan sebagai basis perbaikan layanan. Oleh karena itu, transformasi tata kelola harus diarahkan pada pembukaan ruang kolaborasi dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat *top-down* melainkan responsif terhadap aspirasi publik yang menjadi objek utama pelayanan (Pratama & Frinaldi, 2025; Sendika & Frinaldi, 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025).

Analisis terhadap aspek profesionalisme dan efektivitas kerja menyoroti hambatan struktural yang signifikan berupa keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta dominasi sistem pengarsipan manual. Kompetensi aparatur yang belum merata, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen kearsipan modern, menjadi penghalang utama dalam mewujudkan layanan yang cepat dan akurat. Ketergantungan pada metode kerja konvensional menyebabkan inefisiensi waktu dan tenaga, yang berdampak langsung pada lambatnya respon organisasi terhadap kebutuhan administrasi. Temuan ini selaras dengan argumen Darmansah et al. (2024) yang menekankan urgensi inovasi dan penguatan kapasitas aparatur sebagai prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif. Dalam era digital saat ini, ketertinggalan dalam adopsi teknologi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah strategis yang dapat menurunkan kredibilitas institusi. Profesionalisme aparatur tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan instrumen kerja modern untuk menghasilkan *output* yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia, sehingga modernisasi sistem kerja menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka masih berada pada tahap kepatuhan administratif semata dan belum menyentuh level substantif. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme masih dimaknai secara sempit sebagai kewajiban internal birokrasi, belum bertransformasi menjadi budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Keterbatasan ini memiliki implikasi serius terhadap daya saing dan relevansi dinas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya sekadar kekurangan infrastruktur atau anggaran, melainkan perlunya perubahan *mindset* aparatur dari mentalitas penguasa birokrasi menjadi pelayan masyarakat. Upaya perbaikan ke depan menuntut adanya sinergi antara modernisasi sistem melalui digitalisasi arsip dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Transformasi ini mutlak diperlukan agar sekretariat tidak hanya berfungsi sebagai unit pendukung administratif yang kaku, melainkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan menyeluruh.

Prinsip transparansi telah diterapkan dalam bentuk penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan serta laporan keuangan secara internal. Akan tetapi, keterbukaan informasi kepada publik masih terbatas, sehingga transparansi belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diharapkan dalam konsep good governance.

Prinsip akuntabilitas telah diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban administratif dan pelaporan kinerja kepada pimpinan serta instansi terkait. Namun demikian, akuntabilitas masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan kualitas kinerja aparatur, sehingga diperlukan penguatan sistem evaluasi kinerja yang lebih objektif dan terukur. Prinsip partisipasi telah berjalan pada lingkup internal organisasi melalui melibatkan aparatur dalam rapat dan koordinasi kerja. Akan tetapi, partisipasi pemangku kepentingan eksternal, khususnya masyarakat pengguna layanan kearsipan dan perpustakaan, masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya mekanisme partisipatif yang lebih inklusif. Selanjutnya, penerapan prinsip profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi dan kearsipan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan dan pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya modern dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka telah mengarah pada penerapan prinsip good governance, namun masih memerlukan perbaikan dan penguatan, khususnya dalam aspek transparansi publik, akuntabilitas berbasis kinerja, partisipasi eksternal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bantilan, M. M., & Rahmawati. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 71–73. <https://doi.org/10.56630/jsp.v1i1.1361>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v1i2.158>
- Dar, S. A., & Shairgojri, A. A. (2022). Role of women in good governance. *Journal of Social Science*, 3(4), 648–655. <https://www.jsss.co.in/index.php/jsss/article/view/360>
- Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024). Tantangan dan solusi dalam pengelolaan arsip di era digital. *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 16–20. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/1190>
- Dewi, R., & Agustian, W. (2022). Analisis sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 5(2), 51–57. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalbina/article/view/1898>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2334>





- Habibani, R. A., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi publik dalam era digital: Peluang dan strategi implementasi. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 407–416. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5365>
- Hamdah, S., Kiri, P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi publik serta fungsi pemeriksaan internal terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3929>
- He, B., Prasad, S., Higashi, R. T., & Goff, H. W. (2019). The art of observation: A qualitative analysis of medical students' experiences. *BMC Medical Education*, 19(1), 234. <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1671-6>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2025). Dari birokrasi ke birokrasi inovatif: Peran transformasi budaya institusional. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 388–397. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5374>
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Permatasari, I. (2020). Kajian penerapan prinsip good governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 4(1), 1–12. <https://jurnal.lppm.unserang.ac.id/index.php/jakpp/article/view/2642>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: Piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(3), 428–440. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181>
- Pratama, T., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi dan partisipasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik: Studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 639–648. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5732>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1536>
- Saputri, D. E., & Mellita, D. (2024). Kesiapan sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dalam menghadapi transformasi digital. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.994>
- Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and data-analysis triangulation in case studies: A scoping review. *Western Journal of Nursing Research*, 46(8), 614–624. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>
- Sendika, M., & Frinaldi, A. (2025). Transformasi budaya organisasi di sektor publik: Inovasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 371–380. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5376>
- Supawanhar, S., Askani, A., & Hartono, R. (2024). Kualitas pelayanan sektor publik dengan pendekatan perspektif new public management (NPM). *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 502–513. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.1014>
- Surahmi, S., Ahmad, M. S., & Muttaqin, M. (2025). Evaluasi kinerja pejabat fungsional auditor di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1630–1639. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8136>



- Suryani, I. (2019). Layanan informasi publik dan partisipasi publik. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(2), 227. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.793>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610–618. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Vantiola, M., Kedoh, L., & Mustafa, I. (2024). Perpustakaan keliling Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka sebagai sarana pelayanan publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 4(3), 329–338. <https://jurnal.arusmedia.id/index.php/ajsh/article/view/284>
- Vignali, C., Hallier, B., & Stanton, J. L. (2016). Research methodology. *International Journal of Sales, Retailing & Marketing*, 5(1), 3–14. <http://www.ijstrm.com/vol5no1.html>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving public information transparency in the dissemination of local regulations. *Yuridika*, 38(3), 635. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>